

## Sudah 99%, Jembatan Alalak Segera Diresmikan Presiden



**Sumber gambar:**

<https://jurnalkalimantan.com/sudah-99-jembatan-alalak-segera-diresmikan-presiden/>

Jembatan Sungai Alalak yang menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah hampir rampung, yang rencananya segera diresmikan Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Gubernur H. Sahbirin Noor, saat meninjau langsung progres pembangunan jembatan megah tersebut.

“Kita bersyukur sekali dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, dan ini insyaAllah akan dikunjungi bapak presiden, mudahan tidak ada aral melintang,” ucapnya di sela kunjungan, Senin (13/09/2021). Ditambahkannya, infrastruktur ini bakal menjadi kebanggaan warga Banua, dan sangat bermanfaat untuk aktivitas masyarakat Kalsel menuju provinsi tetangga. “Tentu ini menjadi salah satu karya terbaik yang ada di Kalsel, ini sangat membanggakan bagi kita semua dan telah dinanti orang banyak,” ungkap Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalimantan Selatan).

Jembatan dengan panjang 850 meter ini menggunakan anggaran Rp272 miliar, dengan progres pengerjaan sudah 99%. Sementara itu menurut Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalsel Sauqi Kamal, sarana penyeberangan ini bakal selesai dikerjakan sesuai masa akhir kalender kontrak pada tanggal 15 September 2021. “Tinggal pengerjaan finising saja hingga pengecatan,” bebarnya. Jembatan ini urai Sauqi berbentuk

unik dan menjadi yang pertama di Indonesia dengan bentuk struktur melengkung dan tidak simetris, dengan dana pembangunannya menggunakan alokasi Surat Berharga Syariah Negara kontrak tahun jamak 2018—2021. Sejumlah warga di Kecamatan Alalak, khususnya yang memiliki usaha di sekitar area pembangunan, ikut berbangga atas selesainya jembatan yang menghabiskan dana Rp278 miliar ini. “Kami sangat bangga atas ikon baru ini. Saya berharap jembatan ini lekas dibuka, sehingga usaha kami bisa semakin lancar, mengingat selama 3 tahun dibangun, setiap hari kawasan Handil Bakti mengalami kemacetan parah,” ungkap H. Uci, pemilik usaha kebutuhan pokok. Hal senada diungkapkan Eka, ibu rumah tangga di Kelurahan Handil Bakti. “Jembatan Sungai Alalak selain bisa dijadikan spot baru untuk berfoto, juga akan memperlancar akses dari dan ke Banjarmasin,” ujarnya.

Sementara pada sumber yang berbeda disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada acara diskusi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dengan tema bahasan Indonesia Tumbuh dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan pada hari Rabu, (18/8/2021) bahwa “Untuk tahun 2021 ini, ada 5 program prioritas yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sesuai arahan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kita utamakan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi ini,” kata Menteri Basuki.

Program prioritas yang pertama adalah penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020, antara lain pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 Ha daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olahraga dll.

“Sampai dengan bulan Agustus ini, ada 4 bendungan yang sudah siap diresmikan yaitu Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuningan, Bendungan Paselloreng, dan Bendungan Bendo. Total bendungan yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini yaitu 13 bendungan, termasuk Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang akan digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta,” jelas Menteri Basuki.

Selain bendungan, pada tahun ini juga akan diselesaikan beberapa infrastruktur konektivitas diantaranya Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 1, 6 Ruas Dalam Kota Jakarta Seksi A Kelapa Gading – Pulo Gebang, Cibitung – Cilincing Seksi 1, Balikpapan – Samarinda Seksi 1 dan 5, dan Jalan Lingkar Brebes Tegal. Sedangkan pada bidang permukiman telah diselesaikan pembangunan Pasar Sukawati Blok A dan Blok B Kab. Gianyar, Venue Piala Dunia FIFA U-20 Kota Surakarta, TPA Talang Gulo Kota Jambi, Supit Urang Kota Malang, dan Jabon Kab. Sidoarjo

Kemudian program prioritas yang kedua adalah program Padat Karya Tunai (PKT). Untuk tahun 2021, anggaran PKT sebesar Rp21,2 Triliun yang menyerap 988.054 tenaga kerja, sedangkan untuk paket konstruksi reguler yang dikerjakan dengan pola padat karya sebesar Rp2 Triliun yang menyerap 244.639 tenaga kerja. Menteri Basuki mengatakan melalui program PKT ini diharapkan dapat membuka kesempatan kerja minimal selama 6 minggu untuk setiap tenaga kerja.

Selanjutnya program prioritas yang ketiga adalah penyelesaian pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Menteri Basuki memastikan penataan kawasan 5 DPSP ini akan dapat diselesaikan pada tahun 2021. Sedangkan program prioritas yang keempat adalah pengembangan food estate di 3 lokasi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Program prioritas yang kelima yaitu pengembangan Kawasan Industri (KI) Terpadu Batang di Jawa Tengah.

Menteri Basuki optimis bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan dengan baik dan diselesaikan sampai tuntas meskipun adanya dampak dari pandemi Covid-19, salah satunya yaitu refocusing anggaran.

#### **Sumber berita:**

1. <https://jurnalkalimantan.com/masyarakat-batola-siap-sambut-ikon-baru-jembatan-sungai-alalak/>, *Masyarakat Batola Siap Sambut Ikon Baru Jembatan Sungai Alalak*, 21 September 2021.
2. <https://www.pu.go.id/berita/dukung-pemulihan-ekonomi-nasional-pembangunan-infrastruktur-pupr-tahun-2021-difokuskan-pada-5-sektor-prioritas>, *Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2021 Difokuskan Pada 5 Sektor Prioritas*, 19 Agustus 2021.

#### **Catatan Berita:**

**Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025** mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

#### **Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan**

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>1</sup>

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>2</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.<sup>3</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.<sup>4</sup>

### **Program Pembangunan Nasional**

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.<sup>5</sup>
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.<sup>6</sup>
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.<sup>7</sup>
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 angka (3)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 angka (4)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (1)

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (2)

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (1)

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2)

- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.<sup>9</sup>
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.<sup>10</sup>
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.<sup>11</sup>
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

### **Rincian Program Pembangunan**

#### **Kondisi Umum**

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.<sup>13</sup>
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004,

---

<sup>9</sup> ibid, Pasal 6 ayat (3)

<sup>10</sup> ibid, Pasal 7 ayat (1)

<sup>11</sup> ibid, Pasal 7 ayat (2)

<sup>12</sup> ibid, Pasal 7 ayat (3)

<sup>13</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.<sup>14</sup>

### **Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025**

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.<sup>15</sup>
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.<sup>16</sup>
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.<sup>17</sup>
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya

---

<sup>14</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

<sup>15</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

<sup>16</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

<sup>17</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.<sup>18</sup>

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.<sup>19</sup>
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.<sup>20</sup>
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.<sup>21</sup>
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.<sup>22</sup>
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi

---

<sup>18</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

<sup>19</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

<sup>20</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

<sup>21</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

<sup>22</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.<sup>23</sup>

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

<sup>24</sup> Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22